

Heru Budi Minta Dishub Koordinasi Bawaslu Usai Stiker Caleg di TransJ

JAKARTA (IM) - Viral aksi vandalisme penempelan stiker calon legislatif (caleg) berlogo Partai Ummat di kursi penumpang bus TransJakarta (TransJ). Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono meminta PT TransJakarta hingga Dinas Perhubungan (Dishub) koordinasi dengan Bawaslu.

"Ya nanti minta TransJakarta dengan Dishub koordinasi Bawaslu ya," tutur Heru Budi usai menghadiri acara Hari Disabilitas Internasional di Ancol, Jakarta Utara, Kamis (7/12).

Properti bus TransJ menjadi sasaran vandalisme penempelan stiker caleg. Dalam sebuah video di media sosial, seorang penumpang TransJ menunjukkan stiker caleg itu ditempel di bagian belakang kursi penumpang. Terlihat stiker caleg itu langsung dicopot.

Disebutkan penempelan stiker caleg salah satu parpol itu terjadi di bus TransJ rute 6A. Selain itu, di dalam bus itu didapati setidaknya ada 2 kursi penumpang lain yang ditempel stiker caleg.

Pihak TransJakarta prihatin dan menyangkan aksi vandalisme yang men-

gotori fasilitas umum (fasum). Pihak TransJ mengingatkan bahwa penempelan atribut kampanye pada fasum dilarang.

"Tanggapan dari kita, untuk pemasangan stiker atau atribut di fasum, tempat-tempat publik dilarang sesuai UU yang berlaku dari Bawaslu," kata Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan dan Humas TransJakarta, Apriastini Bakti Bugiansri, Rabu (6/12).

Apriastini mengatakan petugas TransJakarta akan menegur penumpang yang melanggar protokol tersebut. Namun, bila teguran diabaikan, TransJakarta akan berkoordinasi dengan Bawaslu untuk menindak pelanggaran tersebut.

Sementara itu, Partai Ummat tegas akan memberikan Surat Peringatan (SP) apabila calegnya menempelkan stiker di kursi penumpang TransJakarta.

"Kita lagi cari siapa pelakunya. Jika caleg maka kita akan beri surat peringatan/teguran," kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu Nasional (BPPN) Partai Ummat Taufik Hidayat kepada wartawan, Rabu (6/12). ● yan

Kota Depok Sudah Berlakukan Berobat Gratis Cukup Pakai KTP

DEPOK (IM) - Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono menyampaikan kalau per 1 Desember 2023 layanan kesehatan di kota itu telah menerapkan Universal Health Coverage (UHC). Tiap warga yang ingin berobat ke puskesmas atau rumah sakit cukup memperlihatkan KTP, tak perlu bayar.

Imam menerangkan berobat menggunakan KTP itu ditalangi Pemerintah Kota Depok lewat anggaran Rp112,8 miliar. Itu dialokasikan untuk sekitar 237 ribu warga.

Imam menyatakan UHC tersebut berlaku bagi warga Depok yang sudah maupun belum punya asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan.

"Tapi ini khususnya untuk warga yang tidak sanggup membayar BPJS," katanya, Kamis (7/12).

Ia juga menjelaskan tarif puskesmas di seluruh Kota Depok saat ini sudah tidak berlaku. Kecuali bagi warga non-KTP Kota Depok. Untuk itu, Imam meminta warga yang bermukim di kota itu namun belum memiliki KTP Depok agar mengubah dokumen kependudukannya.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera atau PKS ini men-

gungkapkan, saat ini masih ada tiga rumah sakit yang belum bekerja sama dengan BPJS Kesehatan di wilayah kota itu.

Ketiganya adalah RS Puri Cinere, RS Anak Bangsa, dan RS Brawijaya.

"Saat ini sedang dalam proses, semoga bisa segera dapat bekerja sama untuk melayani BPJS," kata Imam.

Layanan UHC dengan hanya menunjukkan KTP juga disebutkannya menggantikan mekanisme bantuan sosial yang ada sebelumnya.

Ia pun mengingatkan masih ada batasan yang berlaku untuk layanan kesehatan universal ini.

"Seperti membuat konten tapi membahayakan diri atau sebuah kegiatan untuk mempercantik diri, misalnya operasi plastik dan sebagainya kemudian gagal, itu semua tidak bisa tercover berobat gratis pakai KTP," tutur Imam.

Imam meminta masyarakat memanfaatkan call center atau layanan pengaduan di 081285431490 ketika ada persoalan berobat menggunakan KTP, baik rawat inap maupun rawat jalan.

"Tapi utamanya saya berpesan kepada warga Depok untuk tetap menjaga kesehatan," ucapnya. ● yan

Imbas Hujan, Tiga Turap di Bojongsari Ambrol ke Saluran Drainase

DEPOK (IM) - Tiga turap dinding penahan saluran drainase di Kota Depok, Jawa Barat (Jabar) ambrol. Turap-turap ambrol di kawasan Kecamatan Bojongsari itu, mengancam rumah warga. Kepala Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Bahtiar mengatakan, turap-turap dinding penahan tanah itu ambrol pada dini hari Kamis (7/12).

Dinas PUPR Kota Depok sudah menurunkan satuan tugas (satgas) yang terdiri dari 30 personel untuk melakukan penanganan longsor dengan penutupan. "Saat ini baru dilakukan pengangkatan material longsor agar tidak menimbulkan masalah baru," ujarnya.

Dikatakannya, turap akan dipasang sesuai dengan tinggi longsor yaitu 2 meter dan panjang 10 meter. "Pekerjaan ini menggunakan anggaran pemeliharaan, targetnya sampai selesai. Pekerjaan dilakukan secara manual," ungkapnya.

Ia menjelaskan, longsonya turap karena sudah rapuh. Sehingga struktur tanah dan bebatuan bergerak ke tempat yang lebih rendah. "Penyebab tanah long-

sor (landslide) akibat peristiwa pergerakan massa batuan, tanah, dan bahan lainnya ke bawah," ungkapnya.

Ia menjelaskan longsor salah satu jenis bencana alam yang kerap terjadi di Kota Depok selain banjir, kekeringan, dan angin puting beliung dan umumnya tanah longsor terjadi karena resapan air dalam tanah menyebabkan bobotnya bertambah, hingga akhirnya menembus dan menyebabkan tanah bergerak.

Di musim penghujan, risiko terjadinya tanah longsor kian besar. Selama musim kemarau, kadar air dalam tanah cenderung menguap dan membentuk retakan. "Ketika musim hujan datang, air akan memenuhi celah tersebut, dan membuat tanah melunak. Ketika fenomena ini terjadi, pergerakan tanah mulai terjadi dan mengakibatkan longsor," terangnya.

Bahtiar berpesan, kepada seluruh masyarakat Kota Depok untuk waspada. Utamanya waspada terhadap potensi keretakan tanah yang bisa menimbulkan longsor. "Kami meminta masyarakat untuk melapor jika ada potensi longsor ataupun banjir di wilayah masing-masing," tuturnya. ● pp

4 | Metropolis

FOTO/ANTARA



PRESIDEN BUKA PAMERAN UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR

Presiden Jokowi didampingi Menteri BUMN Erick Thohir (kiri), Menkop UKM Teten Masduki (kedua kiri), Seskab Pramono Anung (ketiga kiri), Mendag Zulkifli Hasan (kelima kiri), Dirut BRI Sunarso (ketiga kanan) dan Direktur Bisnis Kecil dan Menengah BRI Amam Sukriyanto (kanan) meninjau pameran UMKM EXPO (RT) BRILIAN-PRENEUR 2023 di JCC, Jakarta, Kamis (7/12). Pameran berlangsung hingga Minggu (10/12).

Kasus Covid-19 Naik Lagi, Warga Pralansia Diminta Lengkapi Vaksinasi

Diharapkan pralansia usia di batas 50 tahun segera melengkapi vaksinasi 4 dosis. Warga pralansia ini masuk dalam kategori yang berpotensi mengalami keparahan jika terkonfirmasi Covid-19.

JAKARTA (IM) - Masyarakat pralansia diimbau melengkapi vaksin Covid-19 sebanyak empat dosis. Sebab, kasus Covid-19 di Jakarta melonjak sejak November 2023. "Diharapkan pralansia usia di batas 50 tahun segera melengkapi vaksinasi 4 dosis," ujar Kepala Seksi Surveilans, Epidemiologi, dan Imunisasi Dinas Kesehatan DKI, Ngabila Salama, saat dihubungi, Kamis (7/12).

Ngabila mengatakan, warga pralansia masuk dalam kategori yang berpotensi mengalami keparahan jika

terkonfirmasi Covid-19.

"Jadi harus dilengkapi vaksinasi sampai empat dosis," kata Ngabila.

Sebelumnya, lonjakan kasus Covid-19 di Jakarta terjadi sejak 13 November 2023. Hingga 3 Desember 2023, jumlah kasus positif Covid-19 naik 30 hingga 40 persen dari minggu sebelumnya. Namun Ngabila tak menyebut angka kenaikan kasus positif Covid-19.

"Dalam satu bulan (November) itu naik 22 persen apabila dibandingkan bulan sebelumnya (Oktober)," ucap

Ngabila.

Menurut Ngabila, Indonesia sejatinya sudah masuk fase endemi Covid-19 sejak Juni 2023. Lonjakan kasus positif Covid-19 di DKI Jakarta terakhir terjadi pada Mei-Juni 2023. Ada kemungkinan imunitas di masyarakat menurun dalam waktu tersebut.

"Polanya enam bulan sekali akan naik seperti ISPA dan pneumonia karena kondisi pancaroba, imunitas orang cenderung turun karena capek, stres, kurang tidur, pola makan kurang baik dan dari segi kuman karena kelembapan tinggi mudah masuk ke tubuh manusia," terang dr Ngabila.

Kenaikan kasus konfirmasi juga tidak dibarengi dengan tren peningkatan bed occupancy rate (BOR) COVID-19. dr Ngabila memastikan sejauh

ini angka perawatan akibat pasien COVID-19 relatif terkendali.

Meski begitu, ada sejumlah kelompok yang perlu memastikan sudah melengkapi vaksinasi booster COVID-19, lantaran berisiko mengalami gejala berat hingga risiko fatal saat tertular.

"Kelompok yang berpotensi mengalami keparahan atau meninggal jika terkena COVID-19 sehingga diharapkan dapat segera melengkapi vaksinasi 4 dosis adalah pralansia usia di atas 50 th, orang dengan komorbid seperti hipertensi, diabetes melitus, stroke, penyakit jantung, kanker, gagal ginjal kronik, autoimun, TB, HIV, dan kondisi imunodefisiensi lainnya."

Pada masa endemi COVID-19, pemerintah tidak lagi melakukan intervensi kewa-

ajiban protokol kesehatan alias kesadaran tersebut diminta berawal dari inisiatif setiap orang. Dinkes mengimbau masyarakat untuk kembali rutin memakai masker terutama saat berada di keramaian, hingga kala mengeluhkan gejala.

Perlu diketahui, pemeriksaan antigen dan PCR disediakan gratis di puskesmas terdekat. Vaksinasi COVID-19 juga masih bisa diakses tanpa biaya hingga penghujung tahun.

Ia menegaskan, peningkatan kasus Covid-19 di DKI saat ini masih aman dan sangat terkendali. Hal itu dilihat dari tak ada kenaikan pasien yang dirawat di rumah sakit.

"Masyarakat diimbau jangan panik, terus tingkatkan perilaku hidup bersih dan sehat," ucap Ngabila. ● yan

Kakantah Jakpus Serahkan Sertifikat Tanah ke 50 Perwakilan Warga Petamburan

JAKARTA (IM) - Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Jakarta Pusat, Sigit Santosa menyerahkan sertifikat tanah kepada 50 perwakilan warga Kelurahan Petamburan, Senin (4/12) lalu.

Penyerahan dilakukan di Ruang Pertemuan Lantai 22 Gedung Blok G Balai Kota DKI Jakarta. Kegiatan penyerahan ini merupakan bagian dari momen penyerahan 2.550.800 sertifikat tanah serentak se-Indonesia oleh Presiden Jokowi. Penyerahan secara daring dan luring ini di Istana Negara juga dihadiri dan disaksikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto.

Sementara penyerahan sertifikat tanah untuk 50 perwakilan warga Petamburan di Balai Kota dipimpin oleh Kepala Bidang



Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta, Harison Mocodompis.

"Penyerahan sertifikat tanah ini menjadi bukti nyata dari komitmen

pemerintah dalam mempercepat proses sertifikasi tanah bagi masyarakat," kata Sigit Santosa usai penyerahan.

"Dengan adanya sertifikat tanah,

diharapkan masyarakat dapat lebih leluasa dalam mengelola tanah mereka, baik untuk keperluan pribadi maupun usaha," lanjutnya menambahkan. ● ber

Antisipasi Banjir dan Timbulnya Wabah Penyakit Babinsa Koramil 04/Gambir Laksanakan Karya Bakti



JAKARTA (IM) - Bersama anggota PPSU serta aparat wilayah, Babinsa Koramil 04/Gambir, Serda Dadang melaksanakan karya bakti, di JL.Setia Kawan, Kel. Duri Pulo, Kec. Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (7/12).

"Kegiatan ini merupakan wujud kemandung TNI dan rakyat, di mana sebagai pengayom serta pembina warga masyarakat yang selalu hadir serta bekerjasama dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, indah dan nyaman,"

ucap Danramil 04/Gambir, Mayor Inf. Iskandar di Makoramil.

"Apalagi memasuki musim penghujan seperti saat ini, tentunya diharapkan adanya kerjasama semua aparat yang berada di wilayah

bersama warga masyarakatnya agar selalu memperhatikan kebersihan lingkungan. Seperti membersihkan saluran air dengan mengangkat lumpur yang sudah mengendap dan juga mengangkat sampah organik maupun nonorganik, sehingga air tidak menggenang ataupun tersumbat," ungkap Danramil 04/Gambir, Mayor Inf. Iskandar.

"Apa yang sudah kita kerjakan secara bersama-sama ini merupakan wujud antisipasi banjir serta sebagai pencegahan timbulnya berbagai macam wabah penyakit," tutup Danramil 04/Gambir, Mayor Inf. Iskandar. ● ber

PENGUMUMAN

Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Sikuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 19, tanggal 07 Desember 2023, yang dibuat dihadapan NITA ALAWIAH, SH, MKN, Notaris di Kota Cilegon, bahwa PT GUDANG KOMUNIKASI INDONESIA, berkedudukan di Jakarta Selatan, telah dibubarkan terhitung sejak tanggal 07 Desember 2023. Kepada pihak ketiga diberikan kesempatan mengajukan keberatan kepada Kami dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak pengumuman ini di muat dalam Surat Kabar.

Itid
Direksi
PT GUDANG KOMUNIKASI INDONESIA

PENGUMUMAN

Direksi PT. TRIGRIYA ARTHA BOGA, berkedudukan di Jakarta Barat ("Perseroan"), dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan akan meninggalkan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dan disetor Perseroan tersebut akan dilakukan dengan cara mengkonversi hutang Perseroan kepada Termini Hendri menjadi saham Perseroan dengan cara mengeluarkan saham baru dalam simpanan sejumlah 300.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp.100.000,- per lembar saham. Demikian pengumuman ini dibuat guna memenuhi ketentuan Pasal 6 PP No. 15 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 08 Desember 2023
Direksi Perseroan